



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013**

SKRIPSI

Oleh

**Sherly Gresita Apriliani
NIM 110810301074**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Sherly Gresita Apriliani
NIM 110810301074**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan ungkapan terima kasi kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini;
2. Orangtuaku tercinta, Sujoko dan Endang Sulistyowati, terima kasih atas kasih sayang, nasihat, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku;
3. Kakaku Fradiska Sulistiawan yang selalu memberi semangat;
4. Galen Rahardian sekeluarga yang telah memberi motivasi dan dukungan;
5. Bapak/Ibu dosen pembimbing dan seluruh dosen Jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan mengajari dengan sabar selama masa studi;
6. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTO

Apabila melaksanakan perintah Allah SWT, maka tanggalkanlah pandangan manusia yang tertuju kepadamu, dan tanggalkanlah kepentingan pribadimu, semua hendaknya engkau tujukan semata-mata kepada Allah saja.

Abdul Qadir Jailani

Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.

Martin Luther King

Yang terburuk dari adegan-adegan di panggung itu adalah orang menjadi begitu terbiasa dengan kebohongan sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan

Douwes Dekker

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Sherly Gresita Apriliani

NIM : 110810301074

jurusan : S1 Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Desember 2014
Yang menyatakan,

Sherly Gresita Apriliani
NIM 110810301074

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013**

Oleh

Sherly Gresita Apriliani

NIM 110810301074

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E, M.Sc.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2013

Nama Mahasiswa : Sherly Gresita Apriliani

Nomor Induk Mahasiswa : 110810301074

Jurusan : Akuntansi / S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 08 September 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Andriana, S.E., M.Sc.
NIP 19820929 201012 2 002

Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.
NIP 19591110 198902 1 001

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Alwan S. Kustono, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19720416 200112 1 001

PENGESAHAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sherly Gresita Apriliani
NIM : 110810301074
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

15 Desember 2014

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak. (.....)
NIP 195911101989021001

Sekretaris : Dr. Hj. Siti Maria W., M.Si., Ak. (.....)
NIP 196608051992012001

Anggota : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak. (.....)
NIP 196701021992032002

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP 196306141990021001

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

Sherly Gresita Apriliani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan dengan memberikan suatu dana khusus yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Penelitian ini berlokasi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, dan anggota LPMD. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.

Kata kunci: akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF FUND VILLAGE ALLOCATION'S MANAGEMENT IN KEDUNGREJO VILLAGE MUNCAR SUB-DISTRICT OF BANYUWANGI IN 2013

Sherly Gresita Apriliani

Department of Accountancy, Faculty of Economic, University of Jember

Accountability is a form of accountability for the management of public funds by the government. A form of government's responsibility to improve the level of development ranging from rustic to give a special fund called the Village Fund Allocation (ADD). This study was conducted to determine the management of the Village Fund Allocation of three stages: planning, implementation, and accountability in the Village Kedungrejo Muncar District of Banyuwangi 2013. This study is located in the Village Kedungrejo Muncar District of Banyuwangi. Data was collected through interviews with respondents method comprising the Village Secretary, Treasurer Village, Kaur Development, and a member LPMD. Data analysis was performed with a model of Miles and Huberman. The results of this study indicate that in the planning, implementation, and accountability has met the applicable procedures. The problem that arises is the lack of coordination between the members of the Management Team of ADD as well as the late submission of accountability reports.

Keywords: *accountability, fund village allocation, planning, implementation, and responsibility*

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013; Sherly Gresita Apriliani, 110810301074; 2014: 45 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan dengan memberikan suatu dana khusus yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Kedungrejo karena pertimbangan faktor geografis dan praktis tersebut. Selain itu, desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena mendapat ADD paling tinggi di Kecamatan Muncar. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini berlokasi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, anggota LPMD, dan Kasi PMD Kecamatan Muncar. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yaitu metode analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar telah memenuhi prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo dapat dikatakan telah cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten. Perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musrenbangdes dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan ADD di Desa Kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam petunjuk teknis, yaitu sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pembangunan sarana fisik dengan ADD tahun 2013 yaitu saluran-saluran air, plengsengan, pemasangan paving, dan renovasi kantor desa. Pertanggungjawaban penggunaan ADD di Desa Kedungrejo dilakukan oleh bendahara desa dengan merekap setiap kegiatan. Bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat disesuaikan berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013” ini bisa terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Andriana, S.E, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing I, dan Drs. Djoko Supatmoko, M.M.,Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Ayahanda Sujoko dan Ibunda Endang Sulistyowati tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Galen Rahardian yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dukungannya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu; dan
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Desa	6
2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)	7
2.1.3 Rumus Alokasi Dana Desa	9
2.1.4 Akuntabilitas	10
2.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban	

ADD	12
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Kerangka Pemikiran	16
BAB 3. METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.3 Teknik Pengumpulan Data	18
3.4 Instrumen Penelitian	18
3.5 Informan Penelitian	18
3.6 Lokasi Penelitian.....	19
3.7 Teknik Analisa Data	19
3.8 Uji Kredibilitas Data.....	20
3.9 Tahapan Penelitian	21
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	22
4.2 Data Responden	26
4.3 Akuntabilitas Pengelolaan ADD.....	26
4.4 Perencanaan ADD.....	27
4.5 Pelaksanaan ADD	31
4.6 Pertanggungjawaban ADD	33
4.7 Matriks Pengelolaan ADD Desa Kedungrejo.....	35
BAB 5. PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Keterbatasan	37
5.3 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Muncar	4
2.1 Penelitian Terdahulu	14
4.1 Batas Wilayah Desa Kedungrejo	22
4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	22
4.3 Jumlah Penduduk	23
4.4 Usia Penduduk	23
4.5 Pendidikan Formal	24
4.6 Pendidikan Informal.....	25
4.7 Kualitas Angkatan Kerja.....	25
4.8 Dusun	25
4.9 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kedungrejo pada Musrenbangdes	28
4.10 Rencana Penggunaan ADD tahun 2013.....	28
4.11 APB-Desa.....	29
4.12 Kepanitiaan Pelaksanaan ADD.....	29
4.13 Pelaksanaan Penggunaan ADD.....	30
4.14 Sarana yang Dibangun dengan ADD tahun 2013	32
4.15 Matriks Pengelolaan ADD Desa Kedungrejo tahun 2013 Berdasarkan Perbup. Banyuwangi No. 20 Tahun 2013	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data.....	20
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian	21

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Hasil Wawancara	39
2. Foto-Foto Sarana yang Dibangun dengan Add Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013	52
3. Nota Pembelian Bahan Material	53

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. (Nordriawan, 2007:1).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan

pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi

daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2013).

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. (BPMPD, 2013).

Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013. Menurut Moleong (2001:86), keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Kedungrejo karena pertimbangan faktor geografis dan praktis tersebut. Selain itu, desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena mendapat ADD paling tinggi di Kecamatan Muncar. Selain itu desa ini juga menjadi salah satu desa yang mendapat ADD paling tinggi di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Muncar

NO	DESA	ADD TAHUN 2013	PERSENTASE
1	Kedungrejo	Rp 189.246.582,57	11,24 %
2	Tembokrejo	Rp 183.571.748,65	10,91 %
3	Kedungringin	Rp 183.347.787,39	10,89 %
4	Wringin Putih	Rp 169.272.284,90	10,06 %
5	Tambakrejo	Rp 167.893.928,95	9,97 %
6	Kumendung	Rp 166.665.146,06	9,90 %
7	Sumbersewu	Rp 157.206.823,99	9,34 %
8	Tapanrejo	Rp 156.544.261,12	9,30 %
9	Sumberberas	Rp 155.956.086,46	9,26 %
10	Blambangan	Rp 153.744.038,26	9,13 %
	TOTAL	Rp 1.683.448.683,00	100,00 %

Sumber: BPMPD Banyuwangi tahun 2013

Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Banyuwangi yang mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan alokasi dana-dana, yang salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Selain itu juga sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan anggaran ke desa – desa dalam bentuk Alokasi dana Desa (ADD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikonstruisikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Kedungrejo. Bagi Pemerintah Kecamatan Muncar dan Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

3. Bagi masyarakat Desa Kedungrejo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.